



Keuangan Islam Sebagai Salah Satu Solusi dalam Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan

Ika Hartika

IAIN Takengon

Ikahartika82@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu upaya mentransformasi kehidupan masyarakat membutuhkan suatu sistem yang dapat menjamin keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat. Sistem keuangan Islam hadir menawarkan solusi yang dapat digunakan sebagai salah satu sistem yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Sistem keuangan Islam saat ini mulai berkembang dan memainkan peran penting dalam mengalokasikan sumber daya dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Sistem keuangan Islam (Syari'ah) yang didasarkan pada prinsip transaksi bebas bunga, berbagi risiko kemitraan dan altruistik donasi, merupakan pusat praktek-praktek keuangan setiap muslim di seluruh dunia. Struktur keuangan Islam sudah jelas bersumber dari Al Quran dan Sunnah. Sistem keuangan Islam juga menganut prinsip keadilan bagi setiap manusia tanpa memandang latar belakang yang berbeda. Berbagai sumber daya dalam Islam dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam pemanfaatannya dalam memenuhi kesejahteraan bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun yang utama dan wajib bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh setiap manusia kepada Allah SWT.

Keywords: Keuangan Islam; Pembangunan Ekonomi; Keadilan

I. PENDAHULUAN

Setiap negara menetapkan rencana pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan rencana pembangunannya sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kendala keterbatasan modal, ketersediaan tenaga kerja yang handal. Kendala-kendala tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menghambat jalannya pelaksanaan pembangunan. Umumnya kendala dan perekonomian terbuka seperti Indonesia, lebih sulit dihindari dari pada kendala dalam perekonomian tertutup karena kendala dalam perekonomian terbuka lebih luas, rumit dan sering di luar kemampuan pemerintah dan masyarakat daripada kendala dalam ekonomi tertutup. Kendala dalam ekonomi terbuka terjadi karena pengaruh perubahan perekonomian dunia terhadap struktur ekonomi dan moneter dalam negeri sebuah negara.

Konsep utama ekonomi Islam adalah keadilan dan pemerataan baik dalam keuangan maupun dalam pembangunan, hal ini membutuhkan proses panjang untuk mengimplementasikannya padahal umat muslim telah lama menantikan realisasi teori ekonomi Islam yang diyakini. Keutamaan keuangan dan ekonomi pembangunan syariah paling mendasar sesungguhnya terletak pada asas keadilan dan pemerataan. Dua asas ini



lah yang akan membedakan antara sistem ekonomi konvensional dan syariah. Selain itu sistem spiritual atau meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT menjadi tujuan utama dalam konsep ini, sehingga tercapai tujuan dalam membuat keadilan yang merata dan saling membantu dalam kehidupan.

Sistem keuangan Islam telah membuktikan kemampuannya untuk lolos dari kebangkrutan pada masa krisis. Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, keuangan Islam harus mewarisi nilai-nilai ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam tidak mengenal *riba* dan *gharar*. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan manusia pada dasarnya bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga berdimensi non fisik (Asy'arie, 2015). Manusia terdiri dari berbagai jenis suku dan adat istiadat yang berbeda, keanekaragaman ini ini bergerak secara dinamis sehingga bisa saja menimbulkan konflik, sehingga dibutuhkan suatu system yang dapat bersifat adil bagi setiap manusia dalam kehidupannya. Dan konsep ekonomi Islam dipandang sebagai salah satu solusi dalam pemecahan masalah dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan pada keadilan yang merata.

Kemunculan dan pertumbuhan yang cepat dari keuangan syariah ini merupakan refleksi atas komprehensif dan lengkapnya lembaga Islam sebagai sebuah agama dengan cara hidup. Islam benar-benar digambarkan sebagai suatu pandangan dunia yang terintegrasi dan sempurna, meliputi beragam aspek kehidupan manusia, aktivitas ekonomi, perilaku politik dan pengembangan edukasi.

Pembangunan ekonomi sudah menjadi tugas utama negara terkait dengan pemenuhan hajat hidup manusia. Pemenuhan kebutuhan masyarakat diatur dan dilaksanakan oleh negara harus bersifat adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Tidak boleh ada terjadinya kesenjangan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik dan ancaman bagi keamanan suatu negara. Oleh karena itu dibutuhkan suatu system ekonomi yang baru yang dapat menyentuh setiap sendi kehidupan masyarakat dan dapat bersifat adil dan merata bagi warna negerinya. Konsep keuangan Islam hadir menjadi salah satu solusi dalam pemecahan masalah tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai rujukan buku yang terkait dengan topik pada masalah yang diangkat. Metode analisis data bertujuan untuk mengaitkan kajian yang digunakan dalam hal yang terkait dengan topik masalah yang dihadapi. Dalam hal ini mencoba untuk menjabarkan kajian keuangan Islam yang dapat digunakan dalam strategi pengembangan dalam pembangunan ekonomi dalam konteks ekonomi yang berkeadilan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keuangan Islam

Keuangan adalah segala sesuatu tentang uang dan keuangan menyangkut alokasi, manajemen, akuisis dan investasi sumber daya. Keuangan merupakan sebuah istilah yang luas dan memperhitungkan banyaknya aspek dari ekonomi dan sistem ekonomi keuangan karena keuangan berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan uang. Banyak yang berpendapat bahwa keuangan Islam adalah doktrin agama dalam menyediakan pembiayaan bagi hasil, amal atau pendanaan bagi wirausahawan muslim. Para sekularitas yang tidak percaya serta pengamat kritis lainnya akan menyampaikan lebih



jauh dengan berpendapat bahwa keuangan Islma merupakan sebuah agenda politik yang lebih luas untuk mentraspormasikan keadaan dunia saat ini, atau setidaknya beberapa aspek darinya, agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam (ISRA, 2015).

Memahami tentang keuangan terlebih dahulu kita memahami tentang ilmu keuangan syariah istilah ini terdiri atas kata pengantar dan ilmu keuangan Islam, Keuangan berasal dari kata uang yang kemudian diberi awal *ke* dan akhiran *an*. Keuangan adalah seluk beluk uang, urusan uang atau keadaan uang (Rosyidi, 2008). Bahwa ilmu keuangan adalah ilmu yang membahas perihal seluk-beluk atau urusan dan keadaan uang. Ilmu keuangan Islam ialah ilmu yang membahas tentang nilai-nilai keuangan dari segi hukum atau syariahnya.

Ekonomi Islam juga disebut sebagai ekonomi syariah, maka istilah keuangan Islam (*al-maliyah al-Islamiyyah: Islamic finance*) yang dimasud dengan pengantar ilmu keuangan Islam adalah ilmu yang mengantar seseorang untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan urusan dan keadaan uang. Dalam hal ini Islam merupakan ajaran yang komplit yang merupakan pedoman manusia dalam kehidupan mencakup berbagai aspek bukan hanya pada aspek ekonomi namun juga pada berbagai aspek lainnya. Sehingga aspek ekonomi sebagai salah satu aspek yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya terutama dalam kegiatan *muamalah* menggunakan Al Quran dan Al Hadist sebagai landasan dalam memperkuat pemerataan ekonomi.

Keuangan Islam menunjukkan dua makna penting kata benda *keuangan* menunjukkan bahwa pasar dan lembaga keuangan Islam menangani alokasi, manajemen, akuisisi dan investasi sumber daya. Tak terelakan, keuangan Islam juga berkaitan dengan isu fundamental dalam keuangan, yakni trasformasi dan manajemen risiko. Oleh karena itu keuangan Islam di harapkan secara mendasar berfungsi serupa atau sedikitnya memberikan efek ekonomi yang sama seperti mitranya yang konvensional. Dan kata sifat Islam mengimplisitkan beberapa perbedaan fundamental antara keuangan Islam dan mitranya yang konvensional. Keuangan Islam dibangun atas beberapa ciri yang khas dan unik, berdasar prinsip-prinsip syariah.

2. Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan Islam (Syari'ah) yang didasarkan pada prinsip transaksi bebas bunga, berbagi risiko kemitraan dan altruistik donasi, merupakan pusat praktek-praktek keuangan beberapa juta Muslim di seluruh dunia. Ribuan umat Muslim di Chicago menggunakan sistem keuangan Syariah berdasarkan hukum Islam, meskipun masih terdapat bank-bank tradisional yang menggunakan struktur pembiayaan konvensional. Menurut Institute of Islamic Banking and Insurance (IIBI) yang berbasis di London, "sistem Islam menekankan kesamaan dimensi etika, moral, sosial dan agama, untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan." Sebaliknya dalam sistem keuangan konvensional, berfokus pada aspek transaksi keuangan dan ekonomi. Sistem finansial syariah yang efisien diharapkan melaksanakan beberapa fungsi yaitu:

- a. Sebagai sistem tersebut harus memfasilitasi intermediasi financial yang efisien untuk mengurangi biaya informasi dan alokasi
- b. Sistem tersebut harus didasarkan pada sistem pembayaran yang stabil
- c. Seiring dengan meningkatnya globalisasi dan tuntutan integrasi financial, sistem financial harus menciptakan pasar uang dan modal yang efisien serta likuid dan pada akhirnya sistem tersebut haarus memiliki pasar yang berkembang dengan baik untuk memperdagangkan risiko, dimana agen ekonomi dapat membeli dan menjual perlindungan risiko peristiwa (*even risk*) serta risiko finansial.



Sistem Keuangan Indonesia pada prinsipnya dibagi menjadi dua jenis yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga Keuangan Bank (LKB) adalah keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*depository financial institution*) dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya: Bank Umum dan BPR. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: dana pensiun, asuransi, modal ventura dan pegadaian.

Dalam khasanah teoritis dikenal, dua kategori lembaga keuangan, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Pengkategorian ini dilakukan karena adanya persamaan dan perbedaan karakteristik. Letak persamaan kedua lembaga keuangan ini adalah keduanya sama-sama menjalankan fungsi sebagai pengelola dana yang yang dihimpun dari masyarakat (Riswandi, 2005).

Lembaga keuangan pada dasarnya mencapai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, jika dilihat dari praktek perekonomian suatu negara, lembaga keuangan senantiasa ikut berperan aktif. Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong perkembangan ekonomi bangsa. Sebaliknya, kalau lembaga keuangan suatu bangsa mengalami krisis, dapat diartikan bahwa perekonomian suatu bangsa tersebut sedang mengalami keterpurukan (*collapse*) (Huda & Nasution, 2009).

3. Struktur Sistem Keuangan Syariah

Struktur sistem keuangan serupa dengan sistem keuangan konvensional. Dengan kata lain sistem keuangan Islam terdiri dari lembaga-lembaga keuangan Islami (bank Islami, dan perusahaan keuangan lainnya dan pasar keuangan, yang juga mendekatkan para pemberi pinjaman dengan para penjamin. Sistem keuangan beroperasi sejalan dengan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan kerangka dan prinsip-prinsip syariah terkait sistem keuangan Islam. Faktor-faktor yang tampaknya mengendalikan struktur sistem keuangan, Islam atau bukan adalah biaya transaksi dan informasi .

Biaya transaksi pada dasarnya penyaluran dana adalah penyampaian modal dari satu pihak kepada pihak lain karena alasan investasi. Penyaluran dana merupakan transaksi mahal yang melibatkan suatu proses kompleks yaitu pestrukturasi keuangan, dokumentasi hukum, perlakuan akuntansi dan tindak lanjut administrasi. Tidak diherankan, biaya transaksi di pasar keuangan masa modern menuntut klaim-klaim besar atas total pengeluaran investasi. Untuk mendapatkan kembali imbalan yang layak, para investor tertarik mereduksi biaya transaksi per unit sebanyak mungkin tanpa mengorbankan kualitas keuangan.

Sistem keuangan berkisar seputar informasi keuangan, tidak hanya melalui struktur hukum sekuritas keuangan yang intrin, melainkan juga melalui informasi pasar yang ekstern yang bisa menjadi pemicu awal pihak-pihak yang berdagang mengusahakan transaksi-transaksi keuangan. Dan membeli sekuritas dari penerbitnya berarti menyerahkan uang kepada pihak yang membiayai, yang biasa menjangkau tanpa pembiayaan tersebut memiliki kepercayaan yang semestinya kepada pihak yang dibiayai.

4. Pasar Keuangan Syariah



Pasar keuangan (*financial market*) merupakan sekumpulan dari berbagai pihak yang melakukan transaksi keuangan di mana pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) menyalurkan dananya untuk dipinjamkan (*loanable funds*) kepada pihak yang kekurangan dana (*defisit units*). Pihak yang kekurangan maupun yang berlebihan dana terdiri rumah tangga atau konsumen (*households*), perusahaan atau produsen (*business*) dan pemerintah (*government*) (Rivai dkk, 2007).

Pasar keuangan adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek yaitu dana berjangka waktu kekurangan dari satu tahun. Kegiatan di pasar keuangan ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan dananya yang sifatnya jangka pendek, pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek. Mereka itu dipertemukan dalam pasar uang, sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan unit yang kelebihan dana memperoleh penghasilan atas uang yang berlebihan tersebut (Soemitro, 2014).

5. Pembangunan Ekonomi

Ekonomi pembangunan (*economic development*) adalah proses pertumbuhan ekonomi jumlah dan pendapatan perkapita negara-negara berkembang yang berpadu dengan perubahan dasar dalam struktur perekonomiannya. Perubahan itu pada umumnya mencakup kepentingan dari sektor industri yang bertolak dari aktivitas agraris, perindahan tenaga kerja dari desa ke kota ke daerah-daerah industri, pengurangan ketergantungan impor bagi produsen yang lebih maju dan batuan negara lain yang memberikan dana investasi dan pergerakan perkembangan ekonomi untuk meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan umum (Winarno & Ismaya, 2003).

Istilah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sering sekali dalam pengertian yang berbeda walaupun telah dibedakan arti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pada akhirnya istilah itu akan sering digunakan secara silih berganti. Secara umum kedua istilah tersebut sering dibedakan artinya. Kebanyakan literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentasi perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2014).

Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pengertian Pembangunan ekonomi. Arti ekonomi pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi dan adanya perubahan ekonomi, pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam penadapat dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu ekonomi pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka sampai dimana taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu negara telah meningkat, tidak mudah diukur secara kuantitatif.

Pendapatan perkapita dan kecepatan pembangunan ekonomi merupakan tingkat pertumbuhan pembangunan ekonomi menggambarkan tentang kenaikan riil dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomi berlaku walaupun terjadi secara berlanjut dalam jangka panjang



belum tentu melahirkan pembangunan ekonomi dan peningkatan dalam kesejahteraan (pendapatan) masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena bersamaan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi akan berlaku pula penambahan penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak memiliki tingkat penambahan penduduk, pendapatan penduduk rata-rata masyarakat (pendapatan perkapita) akan mengalami penurunan. Apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan penambahan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami perkembangan (stagnan) dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan.

Pendapatan perkapita sebagai tingkatan kemakmuran fungsi lain pendapatan perkapita dalam analisis pembangunan ekonomi adalah menggambarkan jurang tingkat kemakmuran diantara berbagai negara. Dalam konteks tingkat kemakmuran suatu negara direfleksikan oleh pendapatan negara yang diterima penduduknya. Semakin tinggi pendapatan tersebut, maka semakin tinggi daya beli penduduk, dan daya beli yang bertambah ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan membandingkan tingkat kesejahteraan berbagai negara, nilai pendapatan per kapita di setiap negara. Dua hal yang dapat ditunjukkan dalam membuat perbandingan tersebut yaitu:

- a. Perbandingan dan perbedaan tingkat pembangunan (kesejahteraan) yang terjadi dalam suatu tahun atau dalam suatu periode tertentu.
- b. Perubahan yang berlaku dalam perbedaan pembangunan di antara berbagai negara dalam jangka panjang.

Ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000). Ketiga faktor penting tersebut adalah:

- a. Akumulasi modal adalah termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik dan sumberdaya manusia (*human resources*), akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar *output* pada masa yang akan datang. Akumulasi modal akan menambah sumberdaya-sumberdaya yang baru dan akan meningkatkan sumberdaya-sumberdaya yang telah ada (Arsyad, 1999).

Akumulasi modal meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Bentuk-bentuk investasi yang menjurus ke akumulasi modal bisa berupa investasi langsung, seperti pengadaan pabrik baru, mesinmesin, peralatan dan bahan baku); dan investasi tidak langsung dalam berbagai jenis sumber daya, seperti pembangunan sistem irigasi akan dapat memperbaiki kualitas tanah pertanian serta meningkatkan produktivitas lahan per hektar. Investasi secara tidak langsung juga bisa pada sumber daya manusia yaitu dengan pembinaan SDM yang akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi (Todaro, 2000). Disamping itu, sumber-sumber kapital juga bisa dari berbagai sumber diantaranya; tabungan masyarakat, pajak, pinjaman pemerintah, penggunaan tenaga yang menganggur, inflasi dan modal asing (Irawan & Suparmoko, 1999).

- b. Pertumbuhan Penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, namun kemampuan merangsang pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemampuan sistem ekonomi yang berlaku dalam menyerap dan mempekerjakan tenaga kerja yang ada secara produktif. selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan



penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

- c. Kemajuan teknologi faktor teknologi tidak kalah pentingnya bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teknologi adalah cara untuk mengolah atau menghasilkan suatu jenis barang atau jasa tertentu. Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada tiga klasifikasi kemajuan teknologi; *Pertama*, kemajuan teknologi yang netral. Ini terjadi jika teknologi tersebut memungkinkan untuk mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. *Kedua*, teknologi yang hemat tenaga kerja, misalnya penggunaan komputer elektronik, mesin tekstil otomatis, dll. Dan *ketiga*, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja, misalnya mesin pemotong rumput dengan tenaga tangan. Disamping itu kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan tenaga kerja, misalnya pembelajaran dengan video-tipe sehingga penyerapan bahan pelajaran menjadi lebih baik. Kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan modal, misalnya penggantian bajak dari kayu dengan bajak baja dalam produksi pertanian

6. Peranan Keuangan Islam dalam Pembangunan Ekonomi

Peran utama sistem keuangan adalah mendorong alokasi efisien sumber daya keuangan dan sumber daya riil untuk berbagai tujuan dan sasaran yang beraneka ragam. Sistem financial yang berfungsi dengan baik akan menciptakan investasi dengan mengidentifikasi dan mendanai peluang bisnis yang baik, memobilisasi simpanan, memonitor kinerja para manajer, memicu perdagangan, menghindari dan mendiversifikasikan risiko dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi ini pada akhirnya mengarah kepada alokasi efisien sumber daya, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat dan perkembangan teknologi yang lebih cepat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan/ pembangunan ekonomi (Iqbal & Mirakhor, 2008).

Keseimbangan ekonomi menjadi tujuan diimplementasikannya sistem ekonomi Islam, landasan upaya menyeimbangkan perekonomian tercermin dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak terjadi pembusukan-pembusukan pada sektor-sektor perekonomian tertentu dengan tidak adanya optimalisasi untuk menggerakkan seluruh potensi dan elemen yang ada dalam skala makro (Sumiyanto, 2008).

Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam berupa:

1. Diwajibkannya zakat terhadap harta yang tidak diinvestasikan, sehingga mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya, disaat yang sama zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang diinvestasikan, Islam tidak mengenal batasan minimal untuk laba, hal ini menyebabkan para pemilik harta berusaha menginvestasikan hartanya walaupun ada kemungkinan adanya kerugian hingga batasan wajib zakat yang akan dikeluarkan, maka kemungkinan kondisi resesi dalam Islam dapat dihindari.
2. Sistem bagi hasil dalam berusaha (*profit and loss sharing*) menggantikan pranata bunga membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha, keberpihakan Sistem bunga kepada pemodal dapat dihilangkan dalam Sistem bagi hasil. Sistem inipun dapat menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil.
3. Adanya keterkaitan yang erat antara otoritas moneter dengan sektor belanja negara, sehingga pencetakan uang tidak mungkin dilakukan kecuali ada sebab-sebab ekonomi riil, hal ini dapat menekan timbulnya Inflasi.



4. Keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu di tingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat, daya beli kaum *dhu'afa* meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil ditengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja.
5. Intervensi negara dalam roda perekonomian. Negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sektor privat untuk menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Dalam pengembangan keuangan dan ekonomi pembangunan di Indonesia menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bapak Bambang Brodjonegoro, Ada 3 bidang utama yang diperlukan untuk menjadi fokus pengembangan dan dipertimbangan yakni:

1. Penguatan sektor ekonomi syariah. Rantai pasokan komoditas halal merupakan potensi yang sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Namun agar optimal, langkah-langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi membutuhkan satu strategi dan program implementasi yang efektif, efisien serta terintegrasi. "Penguatan sektor ekonomi syariah secara signifikan dapat memperkuat struktur perekonomian Indonesia sehingga lebih stabil dan berdaya tahan," jelasnya.
2. Peningkatan efisiensi di pasar keuangan syariah sangat penting untuk dicapai. Peningkatan kapasitas dan efisiensi pada sektor keuangan komersial syariah mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah serta lembaga keuangan non-bank syariah. Sementara sektor dana sosial keagamaan meliputi sektor zakat dan wakaf yang berpotensi untuk memberikan akses yang jauh lebih luas kepada masyarakat pra-sejahtera agar bisa mendapatkan berbagai pelayanan selain pelayanan keuangan, seperti kesehatan dan pendidikan yang murah. Dalam kacamata makro, pengembangan sektor keuangan syariah ini akan sangat membantu untuk menurunkan tekanan fiskal secara signifikan, dalam bentuk penurunan berbagai macam subsidi Pemerintah melalui keterlibatan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan.
3. Penguatan fungsi riset, penilaian dan edukasi. Perlu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kapasitas tersebut akan dapat ditingkatkan melalui berbagai kegiatan riset berkualitas dan pelatihan, sehingga bukan hanya akses keuangan yang dapat diperluas, akan tetapi setiap manusia Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian, agar dapat menjadi bagian penting dari proses pembangunan nasional.

IV. KESIMPULAN

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama keuangan syariah adalah mengalihkan dana yang tersedia (loan able funds) dari penabung kepada pengguna dana. Untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa di samping untuk investasi sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Sistem keuangan syariah berfungsi menyediakan mekanisme pembayaran, menyediakan dana untuk pembiayaan/kredit, penciptaan alat penukaran (uang), dan sebagai sarana mobilisasi tabungan.

Peranan keuangan pada dasarnya mencapai peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian suatu bangsa. dilihat dari praktek perekonomian suatu negara, lembaga keuangan senantiasa ikut berperan aktif. Tumbuhnya perkembangan



lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong perkembangan ekonomi bangsa.

V. REFERENSI

Ahmad Sumiyanto. (2008). *Keunggulan Sistem Ekonomi Islam dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*. Yogyakarta: Safiria Insani Press.

Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Budi Agus Riswandi. (2005). *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Internasional Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). (2015). *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasional*. Jakarta: Rajawali Press.

Irawan dan Suparmoko. (1999). *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Lincoln Arsyad. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE.

Mestika Zed. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Michael P. Todaro. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Alih Bahasa: Haris Munandar). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Muhammad Amin Suma. (2008). *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi & Keuangan Islam*. Tangerang: Kholam Publising.

Musa Asy'arie. (2015). *Filsafat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.

Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution. (2009). *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Santoso Permadi, *Bagaimana Muslim di Amerika Serikat Mengikuti Sistem Keuangan Islam*, <http://www.iaei-pusat.org/news/info-pilihan/bagaimana-muslim-di-amerika-serikat-mengikuti-sistem-keuangan-Islam?language=id>

Sigit Winarno dan Sujana Ismaya. (2003). *Kamus Besar Ekonomi*, Bandung: Pustaka Grafika.

Strategi Jitu Pengembangan Keuangan Syariah di RI, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3576515/strategi-jitu-pengembangan-keuangan-syariah-di-ri>.

Sudono Sukirno. (2014). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta Kencana.

Suherman Rosyidi. (2000). *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori ekonomi Mikro & Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan



Veithzal Rivai , dkk. (2007). *Bank & Financial Institutionn Managemennt Convenntional & Sharia System*. Jakarta; Rajawali Grafinda.

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. (2008). *Pengantar Keuangan Islam teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana.